

PENERAPAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN ANGKA KEMISKINAN PADA DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA SELATAN

Hadi Subakti

Administrasi Negara, STIA Satya Negara Palembang
email: hadisubakti26@gmail.com

Abstract. Hadi Subakti, 19.11.032, 2023, "Implementation of Government Policy in Alleviating Poverty in the Social Service of South Sumatra Province", Head of State Administration at the Satya Negara Palembang College of Administrative Sciences (STIA), Main Supervisor (I) Mrs. Holipah, S.sos., M.Si and Assistant Supervisor (II) Mrs. Aryanisila, S.E., MM., M.Sc.

Poverty is a condition where a person feels unable to fulfill their basic needs. In general, the consequences that will arise in the problem of poverty are the loss of welfare for the poor, namely the failure to fulfill basic needs which include the need for clothing, food and shelter, loss of the right to education, the right to health, exclusion from work that is worthy of humanity, marginalization of the right to legal protection, the right to a sense of security, the right to participation in government and public decisions, the right to spirituality, and the right to freedom of life.

The aim of this research itself is to analyze the implementation of policies in reducing poverty. The research method used is a qualitative research method with data collection techniques used in this research, namely, Observation Techniques, Interview Techniques, and Documentation Techniques.

Policy implementation cannot run well if policy standards and targets are unclear and unmeasurable. This can be minimized by the provincial government and city/district governments working together and coordinating in determining policy targets, and poverty alleviation which has been considered appropriate according to the government turns out to be inappropriate according to the community.

Keywords: Policy Implementation, Poverty Reduction.

I. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana seseorang merasa tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Secara umum, akibat yang akan muncul dari permasalahan kemiskinan adalah kurangnya bantuan pemerintah bagi masyarakat miskin, khususnya ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan penting yang mencakup persyaratan sandang, pangan dan perumahan yang aman, hilangnya hak atas pelatihan, hak atas kesejahteraan, larangan melakukan pekerjaan yang benar-benar layak bagi umat manusia, minimalisasi hak atas jaminan hukum, hak atas perasaan bahwa segala sesuatunya baik, hak untuk bekerja sama dalam pemerintahan dan pilihan publik, hak atas dunia lain, dan hak terhadap peluang hidup. Untuk mengelola kemiskinan, Otoritas Publik

bersama dengan organisasi terkait mengambil langkah penting melalui berbagai mediasi, baik melalui proyek multi-target dan tugas pasar serta pengendalian biaya. Berdasarkan informasi Badan Pengukur Fokus (BPS) Wilayah Sumsel, dalam kurun waktu satu tahun terakhir, Walk 2021-Walk 2022, angka kemiskinan di Wilayah Sumsel turun sebesar 0,94 fokus rate dari 12,84 persen menjadi 11,90 persen. Sementara itu, jumlah kebutuhan individu berkurang sebanyak 69,07 ribu individu, dari 1.113,76 ribu individu menjadi 1.044,69 ribu individu. Permasalahan atau hambatan yang dihadapi adalah:

1. Terbatasnya kemampuan kelompok masyarakat untuk memperoleh hak-hak istimewa ini berarti bahwa daerah semakin dibatasi dalam mengakses layanan publik.
2. Pendekatan dan proyek yang dilaksanakan kurang berhasil sehingga tidak disebarkan secara merata ke seluruh daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang

yang telah peneliti paparkan, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah antara lain untuk menganalisis Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Usman (2002:22), penerapan (eksekusi) bergantung pada latihan, kegiatan, aktivitas atau keberadaan komponen-komponen dalam suatu kerangka. Eksekusi bukan sekadar suatu gerakan, melainkan suatu tindakan yang diatur dan untuk mencapai tujuan tindakan. Menurut Setiawan (2004:7) eksekusi adalah perluasan latihan yang biasanya menyesuaikan arah hubungan antara tujuan dan kegiatan untuk mencapainya dan memerlukan organisasi pelaksana dan keterampilan yang berhasil.

Pengertian Kebijakan

Menurut Irfan Islamy (1999: 150), kelihaian berasal dari “hikmah” dan merupakan kegiatan yang memerlukan perenungan lebih jauh dan mendalam. Dalam waktu rata-rata, strategi adalah kegiatan yang mengingat aturan-aturan yang ada strateginya. M. Solly Lubis (2007:12)

Mengekspresikan kelihaian dalam rasa kecerdikan atau kearifan merupakan pemikiran/pemikiran yang mendalam untuk dijadikan premis (penetapan) rencana strategi. Strategi adalah sekumpulan pilihan yang diambil oleh penghibur politik untuk memilih tujuan dan cara mencapai tujuan. Keban (2008:17), memandang wawasan sebagai suatu pilihan yang mengabdikan sesuatu yang benar-benar dihalangi atau sebaliknya, dengan alasan tertentu, seperti pertimbangan yang bermanfaat, keadaan krisis, dan lain sebagainya. Sementara itu, strategi menunjukkan adanya serangkaian pilihan yang dipilih berdasarkan standar tertentu.

Penerapan Kebijakan

Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005:19), siklus eksekusi adalah “Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang (atau perkumpulan) secara terbuka atau rahasia yang dikoordinasikan atas pencapaian yang tidak sepenuhnya ditentukan dalam pilihan-pilihan masa lalu” (kegiatan yang diselesaikan dengan baik oleh masyarakat/pihak berwenang/pemerintah atau pertemuan rahasia yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang dibingkai dalam pilihan pengaturan).

Model Penerapan

Menurut Keban, (2014:63) pada tataran dasar terdapat dua macam model strategi, yaitu yang pertama, pendekatan yang dirancang “through and through” (top-bottom) dan dari “base to top” (base clincher). ; selanjutnya kedua, pemanfaatan contoh tekanan (ketertiban dan kendali) dan sistem pasar (motivator moneter).

Berikut ini beberapa model penerapan dari beberapa tokoh yang dikutip dari Nugroho (2014: 165) :

1. Model Struktur Pemeriksaan Eksekusi (System For Execution Investigation) dari Daniel Mazmanian dan Paul A. Sebatier, Kedua tokoh tersebut menyusun proses eksekusi strategi menjadi tiga faktor
 - a. Variabel otonom
 - b. Faktor perantara
 - c. Variabel bawahan
2. Model Eksekusi Strategi Brian W. Hoogwood dan Lewis A. Firearm, untuk melakukan strategi eksekusi memerlukan beberapa keadaan, khususnya:
 - a. Terdapat jaminan bahwa keadaan luar yang dilihat oleh kantor/organisasi pelaksana tidak akan menimbulkan permasalahan yang berarti.
 - b. Aset yang cukup dapat diakses, termasuk aset waktu. Keharusan ini menyangkut kemungkinan untuk melaksanakan strategi tersebut.
 - c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada. Kebijakan publik adalah kebijakan yang kompleks dan menyangkut impak yang luas. karena itu, implementasi kebijakan publik akan melibatkan berbagai sumber yang diperlukan, baik dalam konteks sumber daya atau sumber-sumber aktor.

- d. Strategi yang akan dilakukan bergantung pada hubungan sebab akibat yang kuat. Dengan demikian yang menjadi pedoman adalah apakah penataan tersebut benar-benar dapat mengatasi permasalahan yang sedang ditangani.
 - e. Seberapa banyak hubungan kausalitas yang terjadi. Asumsinya, semakin sedikit hubungan sebab-akibat, semakin tinggipula hasil yang dikehendaki oleh kebijakan tersebut dapat dicapai. Sebuah kebijakan yang mempunyai hubungan kausalitas yang kompleks, otomatis menurunkan efektivitas implementasi kebijakan.
 - f. Keterhubungan antara satu dengan yang lain adalah syarat-syarat kecil. Anggapan yang ada adalah jika hubungan ketergantungan tinggi maka eksekusi tidak dapat berjalan dengan sukses, apalagi dengan asumsi pemahaman adalah hubungan ketergantungan.
 - g. Pemahaman mendalam dan penetapan tujuan.
 - h. Errands telah menjelaskan seluk beluknya dan diajukan dalam permintaan yang tepat. Kesalahan yang jelas dan kebutuhan yang jelas adalah kunci keberhasilan pelaksanaan strategi.
 - i. Korespondensi dan koordinasi yang luar biasa. Korespondensi adalah perekat dari suatu perkumpulan dan koordinasi adalah awal dari kerjasama dan penataan energi koperasi.
 - j. Individu yang memiliki kekuasaan dapat tertarik dan memperoleh kepatuhan yang luar biasa. Kekuasaan adalah kondisi untuk pelaksanaan strategi yang meyakinkan. tanpa kekuatan yang bersumber dari kekuasaan maka strategi akan tetap berupa pendekatan-pendekatan yang tidak berpengaruh pada penyusunan sasaran.
3. Model Elmore, Model yang dianut oleh Richard Elmore (1979:121), Michael Lipsky (1971:75), serta Benny Hjren dan David O'porter (1981:59), model ini bermula dari pengenalan organisasi penghibur yang terkait

dengan siklus bantuan dan permintaan. mereka : tujuan, sistem pergerakan dan kotak sentuh yang mereka miliki.

4. Model Jaringan, Model ini memahami bahwa proses pelaksanaan strategi adalah proses koneksi yang membingungkan antara sejumlah besar penghibur yang tergabung dalam organisasi penghibur bebas.

5. Model Edward III, menekankan bahwa masalah mendasar manajemen kebijakan adalah tidak adanya perhatian terhadap pelaksanaan kebijakan. Ada empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam menjalankan suatu strategi, yaitu :

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Disposisi
4. Strukur Birokrasi

2.2 Pengertian Pemerintah

Perkataan Pemerintah secara etimologis berasal dari kata "pemerintah". sedangkan kata Pemerintah berasal dari "Permintaan". Permintaan mempunyai arti meminta sesuatu untuk diselesaikan. Otoritas publik adalah kekuasaan yang mengarahkan suatu negara (distrik suatu negara) atau badan terpenting yang mengendalikan suatu negara, (misalnya biro adalah suatu administrasi). Maka pemerintah adalah demonstrasi (strategi, hal, usaha, dll) dari pemerintah. Kata pemerintah menunjukkan aktivitas para cikal bakal dalam menjalankan kewajiban dan kemampuannya sesuai dengan kekuasaan yang dimilikinya. Namun pada akhirnya, individu memanfaatkan kedua istilah tersebut secara bersamaan atau timbal balik. Karena dalam tulisan bahasa Inggris kita mencari "Government" yang sering diartikan sebagai "Government" atau "Government". Samuel Edward Better dalam bukunya Near Government, mengungkapkan bahwa istilah pemerintah mempunyai empat implikasi yang menunjukkan;

1. Latihan atau siklus pemerintah, khususnya melakukan pengendalian/pengawasan atau pertemuan-pertemuan lain,
2. Permasalahan (issues) di negara-negara dimana latihan atau siklus di atas sering ditemukan,
3. Perorangan (artinya penguasa) yang diberi tugas penyelenggaraan, dan
4. Teknik atau kerangka yang digunakan untuk merepresentasikan budaya tertentu.

Defenisi kebijakan pemerintah telah banyak

dikemukakan para ahli.

Beberapa definisi kebijakan pemerintah dari para ahli itu seperti berikut :

1. Mc Rae dan Wilde

Mengkarakterisasikan strategi pemerintah sebagai "sekumpulan kegiatan yang dipilih oleh suatu pemerintahan yang pada dasarnya mempengaruhi banyak orang."

2. Thomas R.Dye

Mengkarakterisasi strategi pemerintah sebagai "Segala sesuatu yang diputuskan oleh otoritas publik untuk dilakukan atau tidak ditindaklanjuti dengan sesuatu".

3. Young dan Quinn

Mencirikan strategi pemerintah sebagai kegiatan yang dibuat dan dilaksanakan oleh badan pemerintah yang mempunyai kedudukan sah, politik dan moneter untuk melakukan hal tersebut.

4. Anderson

Mencirikan strategi pemerintah sebagai "pendekatan yang diciptakan oleh organisasi dan otoritas pemerintah".

5. David Easton

Mencirikan strategi pemerintah sebagai "bagian nilai yang dibatasi (halal) bagi semua warga negara."

6. R.S. Parker

Mengkarakterisasi strategi pemerintah sebagai "tujuan spesifik, atau serangkaian kegiatan spesifik yang dilakukan oleh otoritas publik pada waktu tertentu yang sebanding dengan subjek atau reaksi terhadap situasi darurat".

Ruang Lingkup Kebijakan Pemerintah

Humas Schools of Public Undertakings and Organization (NASPAA) berupaya merencanakan sejauh mana bidang kajian strategi pemerintah, meliputi lima hal berikut ini:

1. Suatu rangkaian perencanaan, pelaksanaan dan permulaan strategi.
2. Metodologi untuk meningkatkan dan memilih opsi.
3. Sifat wajar untuk mengenali strategi yang masih komparatif dengan pendekatan yang jelas dari wilayah tertentu, wilayah praktis, seperti kesejahteraan, transportasi, dan sebagainya.
4. Membutuhkan kemampuan untuk

melakukan investigasi keuangan, kesimpulan politik, mengeluarkan bukti pembeda, dan penilaian program.

5. Mempunyai informasi dan kewajiban yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan informasi dan penyelidikan yang tajam terhadap tanggung jawab ini, dilakukan dengan menggunakan informasi yang ada mengenai luasnya keputusan publik (public Decision), dan proyek-proyek yang dipercepat setara dengan pintu terbuka dan berkembang, perkiraan keputusan dan dampak daerah setempat, evaluasi yang tulus teknik. tentang manfaat dan kelemahan serta berbagai hal umum dan perkiraan untuk meningkatkan dukungan publik dalam perincian dan penilaian strategi.

Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai banyak aspek dan perincian makna kemelaratan itu berbahaya baik secara wajar maupun membumi mengenai siapa yang bisa dianggap miskin, serta banyak hal tentang keberadaan individu-individu penting yang akses pasarnya dibatasi. dan kualitas pondasi (Royat, 2015: 17).

Kebebasan-kebebasan esensial ini tidak berdiri sendiri namun berdampak satu sama lain sehingga ketidakmampuan untuk memenuhi satu hak dapat mempengaruhi hak-hak istimewa yang berbeda (Aneta, 2012:07).

Rendahnya harapan akan kenyamanan sehari-hari ini secara langsung mempengaruhi derajat kesejahteraan, kehidupan moral dan nilai identitas individu yang disebut miskin (Fikri, 2015: 11).

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk meneliti pada kondisi objektif yang ilmiah. Metode kualitatif juga digunakan untuk mengungkap dan menangkap sesuatu di balik suatu kekhasan.

Definisi konsep dalam penelitian ini adalah

- :
1. Eksekusi strategi adalah cara yang paling umum dalam melaksanakan pilihan pendekatan yang dilakukan oleh yayasan pemerintah yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam susunan pilihan. Eksekusi strategi secara luas merupakan perangkat

organisasi yang sah di mana berbagai penghibur, asosiasi, metodologi dan prosedur bekerja sama untuk melaksanakan strategi guna mencapai efek atau tujuan yang ideal. Penerapan dari sisi berlawanan merupakan kekhasan yang rumit, mungkin cenderung dianggap sebagai interaksi, mengalah atau sesudahnya.

2. Pengurangan kebutuhan adalah sesuatu yang beresiko baik pada tingkat wajar dan membumi sehubungan dengan siapa yang dapat dianggap sebagai individu miskin, serta banyak hal tentang keberadaan individu miskin yang memiliki akses pasar dan kualitas kerangka kerja yang terbatas.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini camat, sekretaris camat, staff kecamatan dan masyarakat dengan total jumlah 5 orang yang terdiri dari yaitu:

Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin	1 Orang
2.	Sub Kordinator Penanganan Fakir Miskin	1 Orang
3.	Sub Kordinator Data dan Informasi	1 Orang
4.	Masyarakat	4 Orang
Jumlah		7 Orang

Ada beberapa teknik pengumpulan data kualitatif yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan studi perpustakaan. Teknik wawancara digunakan untuk memperoleh keterangan informasi penjelasan secara langsung sehingga hasil yg diperoleh dapat di percaya.

Analisis data menurut Sugiyono (2016:244), suatu proses mencari dan mengumpulkan informasi yang diperoleh dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi secara metadis, dengan cara memilah-milah informasi ke dalam kelas-kelas, menggambarkan ke dalam unit-unit,memadukannya,mengorganisasikannya ke dalam desain. , memilih apa yang penting dan apa yang akan direnungkan,

dan mengakhirinya dengan tujuan agar hal-hal tersebut mudah dipahami tanpa bantuan siapa pun dan orang lain.

Adapun teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data yaitu menyimpulkan, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal penting yang sesuai dengan pokok bahasan ujian, mencari topik dan contoh, akhirnya memberikan gambaran yang lebih jelas dan menjadikannya lebih mudah untuk melengkapi kumpulan informasi lebih lanjut.
2. Penyajian Data artinya, memperkenalkan informasi. Dalam pemeriksaan subjektif, penyajian informasi harus dimungkinkan dalam bentuk tabel, diagram, diagram alur, piktogram, dan sebagainya.
3. Penarikan Kesimpulan penemuan-penemuan baru yang belum pernah ada. Penemuan dapat berupa gambaran atau gambaran suatu artikel yang tadinya kabur sehingga setelah diteliti ternyata menjadi jelas.

IV. GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Pada tanggal 26 Oktober 1999, Pemimpin Republik Indonesia (Bapak KH. Abdurahman Wahid) mendeklarasikan pembentukan Biro Solidaritas Masyarakat, menjual Pembagian Partai, kemudian kemampuan peningkatan di lapangan bantuan sosial pemerintah di Wilayah Sumatera Selatan dipindahkan ke Badan Umum Daerah Sumatera Selatan.

Berkaitan dengan penugasan pindah, kesanggupan tenaga Dinas Perhimpunan Wilayah Sumatera Selatan telah dilakukan penyempurnaan dan revisi terhadap Pedoman Kabupaten Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pembinaan Tenaga dan Tata Kerja Bansos Propinsi Sumatera Selatan. Menanggapi hal tersebut, Pimpinan DPRD Sumatera Selatan melalui Surat Keterangan nomor 57 Tahun 2000 tanggal 3 Mei 2000 menetapkan Organisasi Kerja Badan Penanggulangan Kewenangan Umum Pemerintah Sumatera Selatan Gabungan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pokok Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 Tanggal 29 Desember 2000 Tentang Progresif

Pembinaan dan Tata Kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Peraturan Daerah Daerah Sumatera Selatan Yang Terakhir Nomor: 10 Tahun

2007 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 11 Tahun 2000 Tentang Perbaikan dan Kerja Sistem Tenaga Listrik Pekerjaan Umum Sumatera Selatan dan Pedoman Utusan Utama Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Penggambaran Kewajiban dan Unsur-Unsur Administrasi Bantuan Pemerintah Sosial Wilayah Sumatera Selatan dan Pedoman Wakil Pimpinan Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Hirarki Pembinaan, Penggambaran Kewajiban dan Unsur Bantuan Sosial Wilayah Sumatera Selatan

Kondisi Fisik dan Sosial

Gedung kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 2 lantai yaitu

a. Lantai 1 terdapat 5 ruangan, yaitu:

1. Ruangan Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Ruangan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
3. Ruangan Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial
4. Ruangan Bidang Pemberdayaan Sosial
5. Ruangan Bidang Penanganan Kemiskinan

b. Lantai 2 terdapat 6 ruangan, yaitu:

1. Ruangan Kepala Dinas
2. Ruangan Seketariat
3. Ruangan Bagian Perencanaan, evaluasi dan pelaporan
4. Ruangan Bagian Keuangan
5. Ruangan Unit Pelaksana Teknis Dinas
6. Ruangan Rapat

Disamping dan halaman depan kantor Dinas Sosial Povinsi Sumatera Selatan terdapat halaman parkir kendaraan roda dua dan roda empat.

Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan merupakan instansi pemerintah yang berfokus pada kesejahteraan sosial masyarakat yang ada di Provinsi Sumatera Selatan yang berada di di pusat kota Palembang dan area perkantoran Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan, beralamat di Jl. Kapten Anwar Sastro No.1246, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, adapun lingkungan sosial yang ada disekitar Kantor Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

antara lain:

1. Dekat dengan Kantor Kantor Gubernur Sumatera Selatan
2. Bersebelahan dengan Gedung Dharma wanita Persatuan Dinas Kesejahteraan Sosial
3. Dekat dengan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Sumatera Selatan
4. Dekat dengan Kantor Kesbangpol & Linmas Provinsi Sumatera Selatan
5. Dekat dengan Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Selatan
6. Bersebelahan dengan Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan
7. Dekat dengan Kantor Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
8. Dekat dengan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulis dalam hal ini akan memaparkan hasil penelitian tentang Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi serta studi pustaka dalam pengumpulan data agar mendapatkan informasi serta pemahaman kepada penulis terkait fokus penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam pengumpulan data. Pendekatan-pendekatan tersebut dapat mengukur kesejahteraan mereka berdasarkan siklus dan pencapaian tujuan akhir mereka, terlepas dari apakah mereka berada pada jalur yang benar. Pada tingkat dasar, upaya penguatan wilayah setempat yang dilakukan untuk mengatasi kebutuhan harus mencakup upaya untuk meningkatkan batas wilayah setempat. Untuk mengoordinasikan penelitian ini, ahli menggunakan hipotesis susunan Edward III, yaitu Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, Strukur Birokrasi dan Penanggulangan kemiskinan mengacu pada Undang-undang Nomor 13 Pasal 5 Tahun 2011, yaitu Garis Angka Kemiskinan Yang Masih Tinggi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan.

5.1.1. Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan

Secara keseluruhan Penerapan Kebijakan dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan sudah

berjalan dengan baik tetapi harus dilihat juga dalam penerapan kebijakan tersebut kepada masyarakat sudah tepat atau belum, maka dari itu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam hal ini hanya mengawasi kebijakan tersebut turut ikut juga dalam penerapan kebijakan tersebut kepada masyarakat.

Implementasi (Penerapan)

1. Komunikasi

Korespondensi dipandang sebagai suatu komponen yang sangat penting, karena dalam setiap proses pergerakan yang mencakup komponen manusia dan sumber daya manusia, akan selalu muncul pertanyaan “Bagaimana koneksinya?” (Nugroho, 2003:201).

Berdasarkan hasil dengan beberapa narasumber untuk indikator Komunikasi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten sudah berjalan dengan baik hanya saja dalam penerapan kebijakan nya kepada masyarakat yang belum sesuai.

2. Sumber Daya

Setiap pendekatan harus ditopang oleh aset yang memadai, baik aset SDM maupun aset moneter. SDM merupakan kecukupan kualitas dan kuantitas pihak yang menjalankan strategi yang dapat mencakup keseluruhan tujuan pengumpulan. Sementara itu, aset moneter merupakan kecukupan modal untuk suatu program/strategi. Keduanya harus diperhatikan dalam penerapan kebijakan pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk indikator Sumber Daya sudah sangat baik dari mulai siapa saja yang menjadi sasaran dari kebijakan tersebut dan pihak-pihak mana yang terlibat dari penerapan kebijakan tersebut.

3. Disposisi

Bebicara Disposisi berarti berbicara sikap dari pemerintah dalam hal ini pemerintah provinsi dalam membuat suatu kebijakan, sikap demokratis dan komitmen pemerintah akan meningkatkan kesan baik dari kebijakan yang telah dibuat. Mentalitas ini akan menghilangkan hambatan di daerah setempat dan mendorong rasa percaya

masyarakat terhadap pemerintah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk indikator Disposisi sudah sangat baik dari Pemerintah Provinsi terus berkomitmen untuk agar kebijakan yang telah dibuat dapat mencapai tujuannya dan kemiskinan mengalami penurunan.

4. Struktur Birokrasi

Menelaah suatu strategi tentunya tidak dapat dipisahkan dari rancangan peraturan. Konstruksi peraturan menjadi acuan dalam menjalankan strategi mengenai pembagian kesalahan dan kewenangan yang dijalankannya. Konstruksi peraturan berperan penting dalam melaksanakan strategi dan melaksanakan serta menciptakan budaya administrasi yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk indikator Struktur Birokrasi sudah dilakukan dengan baik mulai dari penyusunan kebijakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Pemerintah Provinsi yang mengawasi dan Pemerintah Kota/Kabupaten yang menerapkan kebijakan tersebut.

Penanggulangan Kemiskinan

Terdapat cukup banyak faktor yang dapat mempengaruhi masih tingginya angka kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor penyebab masih tingginya angka kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi yang tidak mengalami peningkatan setiap tahunnya dan masih rendahnya tingkat pendidikan. Angka kemiskinan yang semakin meningkat setiap tahunnya, membuat Pemerintah untuk bekerja keras lagi agar kemiskinan tersebut setidaknya ada penurunan. Berdasarkan informasi Badan Pengukur Fokus (BPS), pada periode 2021 hingga 2022, angka kemiskinan di Sumsel turun 0,94 fokus angka dari 12,84 persen menjadi 11,90 persen, sedangkan jumlah penduduk miskin turun 69.070 orang dari 1.113 orang. 760 individu menjadi 1.044.690 individu. Berdasarkan hasil wawancara peneliti, Pemerintah Provinsi sudah melakukan dengan baik dengan terus berupaya agar kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan mengalami penurunan bukan hanya di daerah perkotaan saja melainkan hingga ke daerah pelosok-pelosok yang ada di Sumatera Selatan.

1. Garis Angka Kemiskinan Yang Masih Tinggi Presentasi Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Kota/Kabupaten	Presentase Penduduk Miskin Menurut Kota/Kabupaten (Persen)		
	2020	2021	2022
Sumatera Selatan	12,66	12,84	11,90
Ogan Komering Ulu	12,75	12,62	11,61
Ogan Komering Ilir	14,73	14,68	13,23
Muara Enim	12,32	12,32	11,12
Lahat	15,95	16,46	15,61
Musi Rawas	13,50	13,89	13,34
Musi Banyuasin	16,13	15,84	15,19
Banyuasin	11,17	10,75	10,00
Oku Selatan	10,85	11,12	10,56
Oku Timur	10,43	10,60	10,05
Ogan Ilir	13,36	13,82	12,33
Empat Lawang	12,63	13,35	12,03
Pali	12,62	12,91	11,76
Musi Rawas Utara	19,47	20,11	18,45
Palembang	10,89	11,34	10,48
Prabumulih	11,59	12,20	11,28
Pagar Alam	9,07	9,40	8,47
Lubuk Linggau	12,71	13,23	12,68

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Selatan Tahun 2023

Berdasarkan tabel tersebut diatas jumlah kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan memang mengalami penurunan dan ada juga kenaikan setiap tahunnya pada beberapa daerah hal ini yang harus jadi perhatian pemerintah provinsi agar setiap tahunnya konsisten adanya penurunan pada setiap daerah, jangan sampai tahun ini ada penurunan sedangkan tahun berikutnya terjadi peningkatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberpa narasumber untuk indikator Garis Angka Kemiskinan yang masih tinggi Pemerintah Provinsi sudah melakukan dengan baik dengan terus berupaya agar kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan mengalami penurunan

2. Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan

Berdasarkan Peraturan Daerah

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan tentunya harus mencapai tujuannya dalam hal ini masyarakat yang menerima dan merasakan kebijakan tersebut jangan sampai ada masyarakat yang tidak menerima dan merasakan hasil dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa masyarakat. Kebijakan Pemerintah yang dibuat belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat dan masih belum tepat sasaran, tentu hal ini harus menjadi tugas penting bagi pemerintah provinsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat selama ini bisa dirasakan oleh masyarakat yang berhak menerima kebijakan tersebut, apalagi pemerintah provinsi yang dari awal selalu berkomitmen dalam mengatasi masih tingginya angka kemiskinan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber untuk indikator Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat dan masih belum tepat sasaran, tentu hal ini menjadi tugas penting bagi Pemerintah Provinsi untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat dapat dirasakan masyarakat.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap Penerapan Kebijakan Pemerintah Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan Pada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam Implementasi (Penerapan) sudah memenuhi indikator yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap), dan Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik dan untuk Penanggulangan Kemiskinan yaitu, Garis Angka Kemiskinan Yang Masih Tinggi dan Kebijakan Pemerintah Terhadap Kemiskinan belum berjalan dengan baik karena dianggap tepat menurut Pemerintah tetapi tidak tepat menurut masyarakat.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian maka penulis ingin memberikan saran kepada Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan agar Penerapan Kebijakan Dalam Penanggulangan Angka Kemiskinan dapat mencapai tujuannya, maka sebaiknya:

1. Diharapkan kedepannya kepada semua pihak yang terlibat untuk dapat fokus dalam penanggulangan kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan.
2. Diharapkan kedepannya pendekatan kepada masyarakat lebih dikedepankan agar kebijakan yang telah dibuat dapat dirasakan oleh masyarakat yang memang berhak menerima hasil dari kebijakan tersebut.
3. Disarankan juga kepada semua pihak yang terlibat agar jangan berpikir dari mana harus memulai menangani kemiskinan tersebut tetapi harus berpikir agar bagaimana kebijakan yang dibuat dapat mencapai tujuannya.
4. Diharapkan dalam penanggulangannya harus berdasarkan data yang jelas sehingga kebijakan yang telah dibuat kedepannya betul-betul dapat dirasakan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

TNP2K, 2011. *Panduan Penanggulangan Angka Kemiskinan*. Jakarta Pusat.

M. Solly Lubis, *Kebijakan Publik*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2007.

Y.T.Keban, *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik*, Konsep, Teori dan Isu, Edisi 2, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2008.

Usman & Nurdin. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Feri, Fadli. 2018. *Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan*. Tesis, Universitas Muhammadiyah Makasar.

Zulkarnaini. 2017. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kawasan Perkotaan*. Universitas Riau.

Silabus. 2019. *Model Implementasi Kebijakan*. Diakses pada 20 Desember 2022.

Sumber:

<https://www.silabus.web.id/model-implementasi-kebijakan/amp/>

Fisip. Unpatti. 2013. *Pengertian Kebijakan Pemerintah*. Diakses pada 20 Desember 2022.

Sumber:

<https://adm.fisip.unpatti.ac.id/wpcontent/upl>

<oads/2019/10/Bahan-Ajar-Kebijakan-Pemerintahan-dikonversi.pdf>

Supardi, dkk. 2022. *Buku Pedoman Penyusunan Skripsi*. Palembang.

Pergub. 2016. *Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial*. Sumatera Selatan.

BPS. 2023. *Presentase Penduduk Miskin*. Diakses pada 17 Juni 2023.

Sumber:

<https://sumsel.bps.go.id/subject/23/kemiskinan.html>

Undang-undang 13. 2011. *Penanganan Fakir Miskin*. Sumatera Selatan.